

# JGOP



## JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 1 JULI 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



Daftar Isi (Table of Content)  
Journal of Government and Politics  
**JGOP**

Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan  
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota  
Berkelanjutan

Hairunnisa, Wisda Aprilia Syaka

1-15

Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara  
(IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia

Hariati, Annisa Saskia Saputri

16-28

Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam  
Perspektif Demokrasi

Heriyanto

29-46

Praktik Citizenship Dalam Melanggengkan Pelayanan  
Kesehatan Melalui Posyandu Sebagai Potret Dari New  
Public Service Studi Kasus Pada Posyandu Tanjung Kota  
Madiun Dan Posyandu Delima Kota Malang

Tia Subekti, Irza Khurunin, Intan Rahmawati

47-63

Implementasi Program Desa Mandiri Di Desa Sebunga,  
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Debbie Yuari Siallagan, Heri Yanto, M. Awaluddin

64-77

Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Pelanggan  
Laboratorium Pemeriksa COVID-19: Studi kasus di  
Laboratorium Biohazard Badan POM

Muhammad Erdiansyah, Fitra Yovita Delviona, Dilin Rahayu Nataningtyas

78-90

Peran Mediasi Ethical Behavior pada Pengembangan  
Organizational Citizenship Behaviors Auditor Publik

Elaine Violche Acanthus, Putri Mega Desiana

91-110

Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di  
Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dindin Supratma

111-120

Integrasi Manajemen Talenta dengan Pengembangan  
Kompetensi ASN

Rahmat Suparman, Sherwin Mikhael Soantahon

121-132



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391  
Vol. 4 No. 1 Juli 2022

## Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



---

### **Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Menuju Kota Berkelanjutan**

<sup>1</sup>Hairunnisa, <sup>2</sup>Wisda Aprilia Syaka  
<sup>1,2</sup> Komunikasi, FISIP, Universitas Mulawarman, Indonesia

---

#### **InfoArtikel**

#### **Sejarah Artikel:**

Diterima: 21-03-2022

Disetujui: 20-05-2022

#### **Dipublikasikan :**

**29-07-2022**

---

#### **Kata Kunci :**

Komunikasi Politik;  
Pembangunan, Ibu Kota  
Nusantara (IKN); Kota  
Berkelanjutan.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sebuah upaya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa datang melalui kajian perspektif komunikasi politik. Komunikasi Politik diperlukan dalam upaya membangun sebuah komunikasi kepada seluruh stakeholders untuk mengathui tantangan pembangunan IKN di masa datang. Selain itu penelitian ini memberikan sebuah gambaran langkah strategis agar pembangunan IKN berlangsung secara optimal yaitu melalui strategi komunikasi politik adapun yaitu strategi komunikasi politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan ikn, strategi komunikasi politik melalui pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan, strategi komunikasi politik melalui keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sehingga asas-asas dalam perencanaan ibu kota dapat terealisasi dengan optimal dan menuju kota berkelanjutan. Artinya, setiap narasi perlu dirancang untuk menerjemahkan bahwa ibu kota negara bukan hanya ibu kota pemerintah, namun juga ibu kota publik, ibu kota sebagai pusat pemulihan harapan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melihat persoalan tersebut maka diperlukan sebuah konsep komunikasi politik sebagai upaya menghadapi tantangan pembangunan IKN dimasa datang.

---

## **Analysis Of Political Communication In Acceleration Of Development Of The Capital Of Nusantara (Ikn) Towards A Sustainable City**

---

*Abstract*

*This study attempts to describe an effort to accelerate the development of the New Capital City or Namely Nusantara (IKN) in the future through a study of the perspective of political communication. Political communication is needed to build communication with all stakeholders to know the challenges of IKN development in the future. In addition, this study provides an overview of strategic steps so that IKN development takes place optimally, namely through a political communication strategy, as for the political communication strategy through the representation of cultural identity in the development of IKN, a political communication strategy through an understanding of cultural diversity and socio-economic conditions of the local population needs to be prepared, a political communication strategy through the sustainability of the livelihoods of residents, a synergy of culture and local wisdom is needed with the use of technology and innovation. So that the principles in capital city planning can be realized optimally and towards a sustainable city. That is, every narrative needs to be designed to translate that the capital city of the country is not only the capital of the government but also the capital of the public, the capital as a center for restoring hope and distributing social welfare. Seeing these problems, a concept of political communication is needed as an effort to face the challenges of IKN development in the future.*

---

2022 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik\_Ummat

\*Alamat Korespondensi:

Jl. Muara Muntai, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75411,  
Email: [hairunnisahusain1701@gmail.com](mailto:hairunnisahusain1701@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) telah ditetapkan secara resmi sebagai salah satu agenda proyek prioritas strategis nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Hal ini berarti dalam kurun waktu 2020-2024 proyek pemindahan IKN yang nilai pembiayaannya mencapai Rp466,04 triliun harus dilaksanakan. Ketetapan putusan ini juga sekaligus menjawab kepastian kebijakan tersebut. IKN akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek pemindahan IKN didorong untuk mempercepat pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2019). Pemerintah meyakini pemindahan IKN akan memberikan sejumlah manfaat ekonomis antara lain peningkatan PDB nasional, pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, dan kesejahteraan secara umum (Adinugroho et al., 2022).

Sebagai sebuah proyek prioritas strategis, sejumlah tahapan penting proyek akan dilakukan dari sisi hulu, yakni kerangka hukum dan kelembagaan sampai di tingkat hilir, yakni pembangunan infrastruktur utama dan penunjang. Sebagai proyek besar, baru dan berbiaya besar, kebijakan ini tidak banyak mendapatkan dukungan publik dalam fase agenda-settingnya baik dalam perspektif sosio-budaya, ekonomi, dan ekologis. Dari perspektif sosial-budaya, proyek tersebut berpotensi memunculkan konflik sosial akibat fenomena gelombang migrasi, baik permanen dan sirkuler, seperti ASN, aparat TNI/Polri, dan kelompok masyarakat lain untuk mengejar potensi ekonomi (Sarmita & Simamora, 2018). Potensi konflik sosial bisa terjadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat misalnya, karena perasaan “tersingkir” masyarakat lokal dan tidak diakuinya lagi hak adat masyarakat lokal oleh negara dan masyarakat baru (Humas LIPI, 2020a). Secara ekonomi, kajian Indef menunjukkan pemindahan IKN dinilai tidak dapat mendorong pertumbuhan PDB dan GNP riil. Kajian dengan model keseimbangan umum ekonomi mengungkapkan dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan PDB justru dinilai tidak ada sama sekali (0%) dalam jangka pendek, serta potensi bagi pertumbuhan PDRB provinsi tujuan hanya 0,24%. Dampak lain, pemindahan IKN juga mendorong terjadinya penurunan output di hampir semua sektor yang berbasis sumber daya alam. Dampak lain mencakup potensi inflasi yang diakibatkan oleh meningkatnya permintaan barang dari besarnya penduduk yang masuk secara bersamaan (Tempo, 2019).

Kebijakan pemindahan IKN bagaimana pun bersifat imperatif secara politis. Dengan besarnya anggaran dan dinamika perekonomian nasional yang kurang mendukung saat ini memaksa pemerintah untuk bekerja secara out of the box. Selain itu untuk mengurangi resiko

dampak maka dengan ini perlunya komunikasi politik yang efektif didalam pembangunan percepatan IKN. Komunikasi Politik merupakan bentuk komunikasi yang mencakup proses penyampaian kepentingan dari suatu individu, atau kelompok masyarakat tertentu kepada lembaga politik mengenai penyelenggaraan kebijakan menyangkut kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut, salah satunya dengan pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Heryanto, 2018). Selaras Pureklolon, (2016) mengartikan komunikasi politik sebagai proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Definisi Perloff ini setidaknya mengandung 2 (dua) unsur, yaitu : Pertama, komunikasi politik merupakan sebuah proses. Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang kompleks dan dinamis. Disamping itu, proses tersebut juga mengandung adanya tarik-menarik pengaruh. Pemerintah mempengaruhi media dengan menawarkan bahan untuk pemberitaan, sementara media mendesak para politisi melalui serangkaian mekanisme institusional sebagai deadline dan nilai berita. Pada sisi yang lain media juga dapat mempengaruhi masyarakat, namun masyarakat juga dapat membentuk agenda media. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik, dengan demikian, tidak hanya concern dengan persoalan pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik. Dengan kata lain, komunikasi politik terjadi ketika masyarakat, media dan pemerintah saling “berdialog” mengenai isu-isu seputar elit dan publik (Pureklolon, 2016).

Pembangunan IKN sejatinya adalah pembangunan yang bersifat bersama bukan karena adanya upaya untuk menguasai aset secara individu atau kelompok nama ini dikenal dengan oligarki (Pratama et al., 2019). Dari persoalan inilah dapat diambil pokok permasalahan yang penulis akan teliti secara mendalam yaitu *Pertama*, bagaimana tantangan pembangunan ibu kota negara dalam perspektif komunikasi politik. *Kedua*, bagaimana strategi komunikasi politik dalam pembangunan interaksi sosial-ekonomi dan budaya. *Ketiga*, bagaimana komunikasi politik dalam pembangunan IKN menuju kota berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini membahas tentang Analisis komunikasi politik dalam percepatan pembangunan IKN di masa depan. maka untuk mendalami topik yang dibahas, penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur yang bersumber dari teori-teori yang relevan dengan



permasalahan dalam penelitian ini, selain itu bukti nyata dalam penelitian ini didukung oleh beberapa sumber media massa yang akurat dan terpercaya dalam melakukan penelitian yang mendalam. Tinjauan Literatur, yaitu mengkaji atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tubuh karya sastra yang berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis pada topik tertentu. Studi Pustaka (*Literature Study*). Menurut Sugiyono (2015), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Pembangunan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Komunikasi Politik**

Peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan sejak awal perencanaan IKN. Mulai tahun anggaran 2020, diharapkan berbagai sektor terkait pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan berbagai kegiatan penyiapan kerja diarahkan untuk meningkatkan kapasitas siswa dan pemuda di wilayah IKN dan penyangganya. Perlu dipertimbangkan pemberian kuota untuk peningkatan keterampilan kelompok marginal (antara lain: Suku Dayak, kelompok perempuan muda, kelompok penyandang disabilitas) agar dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan IKN (Bappenas, 2020; Hamdani, 2020). Ini dikarenakan Persoalan krusial pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), bukan hanya pergeseran lokasi, melainkan juga komunikasi. Jika pemerintah tidak optimal mengomunikasikan urgensi perpindahan tersebut, bisa jadi IKN justru banyak disalahpahami oleh publik. Sebab proyek mercusuar seperti ini tak sekedar urusan pemindahan lokus kekuasaan jangka pendek, tetapi perlu diperhatikan adalah upaya pemulihan harapan dan pemerataan kesejahteraan (Nasional et al., 2019).

Ada lima tantangan mengomunikasikan ibu kota negara baru. *Pertama*, komunikasi sosial dengan masyarakat setempat. Proses komunikasi sifatnya tak hanya menginformasikan adanya perpindahan, melainkan mekanisme adaptasi termasuk memastikan warga daerah tak tergesur. *Kedua*, komunikasi politik dengan elite yang kontra (oposisi) terhadap kebijakan IKN. Upaya komunikasi dilakukan untuk menjelaskan rasionalisasi pemindahan ibu kota secara komprehensif. *Ketiga*, komunikasi korupsi di antara para pihak yang berkepentingan. Dengan angka proyek yang cukup besar ditunjang dengan skema APBN, kerja sama

pemerintah dan badan usaha termasuk investasi langsung dari swasta, rawan terjadi penyalahgunaan anggaran.

*Keempat*, komunikasi bencana berkaitan dengan risiko lingkungan hidup yang berpotensi terjadi. Pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru, tentu tak bisa lepas dari konsekuensi-konsekuensi ekologis yang menyertainya. *Kelima*, komunikasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Pola komunikasi itu tak bisa hanya top-down, tetapi bottom-up. Para pemangku kebijakan perlu memerhatikan arus publik. Sebab, sekecil apa pun riak publik atau gejolak yang ada di masyarakat, tetap berpotensi menjadi krisis komunikasi termasuk menyulut konflik horisontal. Jika mengacu pada *konsep spiral of silence*, individu yang mempunyai pandangan minoritas memang cenderung tak berani menyuarakan aspirasinya. Tapi, itu bukan berarti dapat langsung dinilai menerima, bisa jadi mereka belum memahami atau mendalami isunya. Maka, sekecil apa pun suara sumbang yang muncul, tetap harus disikapi secara benar dan tepat (Republika.co.id. 2022). (Perhatikan Bagan 1.1).

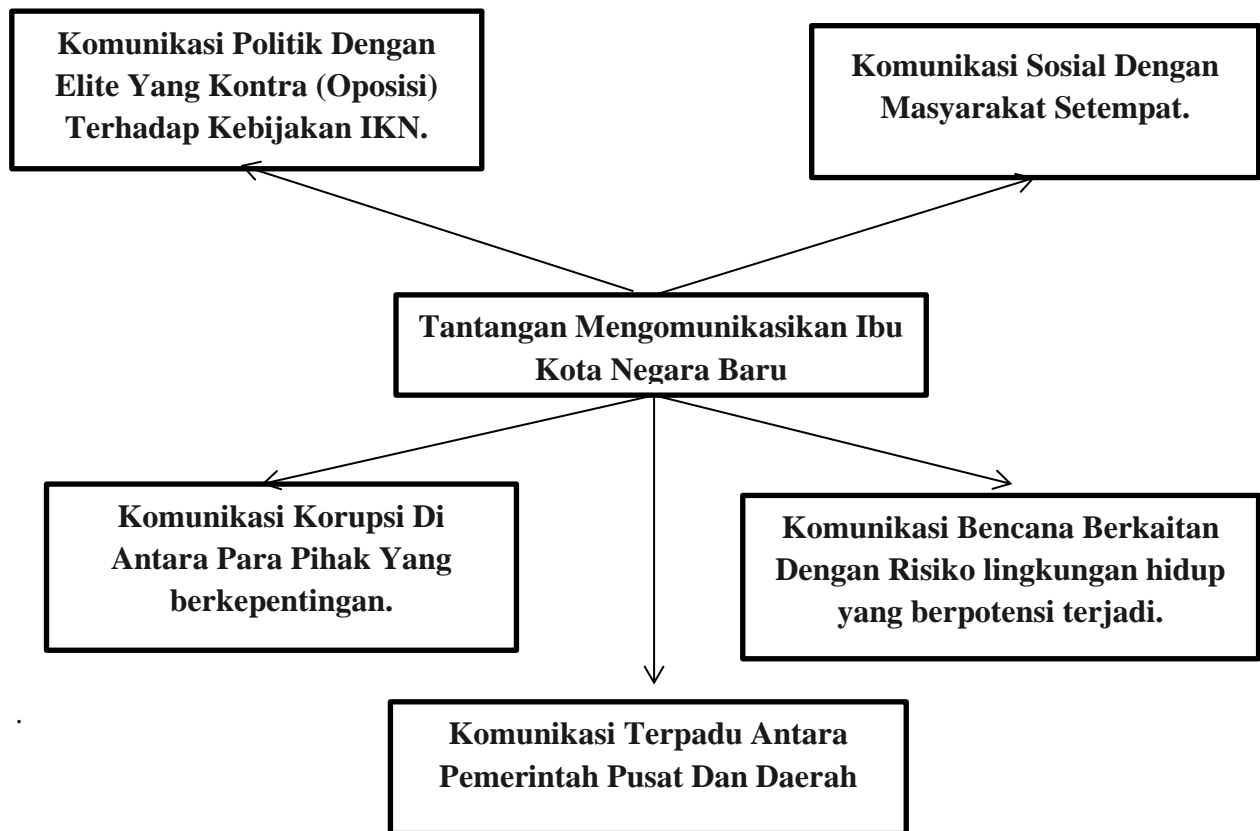
Kegagalan melakukan manajemen isu dapat menjadi bom waktu. Kesepakatan politik saja tak cukup, perlu kesepahaman makna dengan publik. Sebab mereka bukan hanya objek, tetapi subjek pembangunan. Sehingga, setiap narasi perlu dirancang untuk menerjemahkan bahwa ibu kota negara bukan hanya ibu kota pemerintah, namun juga ibu kota publik, ibu kota sebagai pusat pemulihan harapan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melihat persoalan tersebut maka diperlukan sebuah konsep komunikasi politik sebagai upaya menghadapi tantangan pembangunan IKN dimasa datang, ini dikarenakan komunikasi politik adalah salah satu fungsi penting dalam sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Bahkan, tidak berlebihan bila komunikasi politik dinyatakan sebagai “urat nadi” dalam setiap proses politik. Betapa tidak, aneka struktur politik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, media dan warganegara senantiasa terlibat dalam proses interaksi pertukaran makna melalui kegiatan komunikasi politik ini (Susanto, 2017). Kegiatan komunikasi politik itu sendiri bisa menyangkut agregasi kepentingan, penyampaian dan penerimaan aspirasi, negosiasi, sosialisasi, kampanye, lobby dan sebagainya. Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya (komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) dengan alur dan komponen:

1. Komunikator/Sender – Pengirim pesan
2. Encoding – Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan



3. Message – Pesan
4. Media – Saluran
5. Decoding – Proses pemecahan/ penerjemahan simbol-simbol
6. Komunikan/Receiver – Penerima pesan
7. Feed Back – Umpan balik, respon.

**Bagan 1.1 Tantangan Mengomunikasikan Ibu Kota Negara Baru**



Sumber : Dikelo penulis, (2020).

### **Strategi Komunikasi Politik Dalam Pembangunan Ineraksi Sosial-Ekonomi Dan Budaya**

Dibutuhkan sejumlah strategi agar interaksi antara ASN, pendatang lainnya, dan penduduk yang telah ada di wilayah calon ibu kota negara berjalan harmonis. Penerimaan masyarakat dan proses interaksi yang akan terjadi dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang heterogen sangat penting, tidak saja pada saat perencanaan, dan proses pembangunan berlangsung, namun juga hingga berfungsinya ibu kota negara yang baru. Proses pemindahan ibu kota negara yang partisipatif dan inklusif menjadi dasar terbentuknya

kota dengan masyarakat kosmopolitan (majemuk) namun tetap menghargai keberagaman budaya serta dampak lingkungan bakal IKN (Sujana, 2019; Salsabila & Nurwati, (2020).

Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur terdapat lima etnis besar, dengan jumlah pendatang yang cukup besar (73,2%). Porsi terbesar berasal dari Jawa, yang pindah sebagai transmigran pada periode 1970 – 1980an. Pembangunan di Kalimantan Timur juga menarik kepindahan suku bangsa Bugis, Banjar, dan berbagai etnis lainnya, yang banyak diantaranya telah berakulturasi melalui kawin campur lintas suku, termasuk dengan suku bangsa asli seperti Suku Paser, Kutai, dan berbagai kelompok Dayak lainnya. Karakter dan adat istiadat Suku Dayak pada dasarnya sangat terbuka, karena menganut trilogi peradaban, yaitu: hormat kepada leluhur, patuh kepada orangtua, serta berdamai dan serasi dengan negara. Keterbukaan masyarakat asli, keberagaman sosial budaya yang telah terjalin sejak lama, dan terbentuknya masyarakat yang heterogen menjadi nilai tambah bagi kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Sujana, 2019; Salsabila & Nurwati, 2020).

Kehidupan ekonomi warga Kalimantan Timur juga beragam, mulai dari industri kecil dan menengah, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan jasa. Perkembangan industri perkebunan dan pertambangan telah mengubah pola perekonomian masyarakat yang beradaptasi sesuai perkembangan kondisi yang ada. Salah satu persoalan utama yang dihadapi hingga saat ini adalah konflik tenurial kehutanan dan wilayah adat Suku Dayak. Bagi masyarakat suku Dayak, hutan adalah air susu sumber penghidupan dan dianggap sebagai jantung Kalimantan sehingga perlu dilestarikan. Karena keterikatan yang sangat erat ini, masyarakat adat Dayak ingin menjaga dan mengamankan hutan, namun dalam perkembangannya mereka termarjinalkan.

Kehadiran transmigran misalnya, merambah wilayah tanah adat masyarakat Dayak. Desa-desa transmigrasi kemudian dimekarkan menjadi desa definitif dan mendapatkan program sertifikasi tanah, sarana prasarana dasar, dan Dana Desa. Sementara desa masyarakat adat Dayak yang sering kali terpencil di tengah hutan konservasi tidak mendapatkannya. Pada periode 1970an terdapat program resettlement yang memindahkan masyarakat Dayak dari kampung asal leluhurnya, dan kemudian diberikan status hutan Negara. Dengan status ini, dilaksanakan berbagai peruntukan seperti Kawasan konservasi, Hutan Tanaman Industri, atau pertambangan. Kondisi ini menutup akses masyarakat Dayak terhadap tanah leluhurnya, dan jika mereka mencari penghidupan di hutan dianggap sebagai perambah hutan. Saat ini, masyarakat Dayak bekerja di berbagai sektor, mulai dari peladang, bekerja di perkebunan atau

pertambahan, hingga menjadi pegawai negeri . Terkait rencana pemindahan IKN, terdapat 2 potensi dampak sosial ekonomi, yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang bekerja dan tinggal di kawasan hutan perkebunan. Agar kepindahan ASN dan unsur pendukungnya serta pembangunan IKN menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya (Herdiawan, 2021). Dengan demikian diperlukan beberapa strategi yaitu:

**Tabel 1.1 Startegi Komunikasi Politik dalam menekan konflik adanya perpindahan penduduk ke IKN.**

No	Keterangan
1.	Strategi komunikasi politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN,
2.	Strategi komunikasi politik melalui pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan
3.	Strategi komunikasi politik melalui keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Sumber: Dikelola penulis dari Bappenas, (2022).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan secara point per point adapun sebagai berikut: *Pertama*, representasi identitas budaya dalam pembangunan IKN, misalnya digunakannya simbol/ornamen Dayak pada bangunan, pengembangan zona kebudayaan, pelestarian situs budaya melalui museum atau taman seperti contoh di beberapa kota besar dunia. *Kedua*, Pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan untuk menjadi bekal pengetahuan ASN yang akan dipindahkan, agar terjadi integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh semua masyarakat. *Ketiga*. Untuk keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, misalnya tempat usaha beserta alat produksi, pengelolaan pangan yang dikelola oleh masyarakat setempat, pengembangan smart farming, platform penjualan hasil kerajinan, dan sebagainya. Yang diinginkan adalah terwujudnya kegiatan ekonomi yang memandirikan, terjaganya kebudayaan yang bermartabat, tersedianya kesempatan usaha lintas generasi.

### **Pembangunan IKN Menuju Kota Berkelanjutan dalam perspektif Komunkasi Politik**

Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma kota berkelanjutan (*sustainable city*). Brundtland Report dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun, dan sosial (Kodir et al., 2021). Agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030. Agenda pembangunan kota dan permukiman dalam SDGs, bertujuan mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan, mengedepankan transportasi umum, permukiman, perlindungan warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, membangun lingkungan kota yang bersih, dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau.

Agenda Perkotaan Baru/New Urban Agenda (NUA), merupakan agenda perkotaan yang melengkapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan kesepakatan kota-kota di dunia yang bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan hak dan kesempatan yang sama, mendorong inklusivitas dan memastikan setiap penduduk tanpa diskriminasi mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan. Agenda Perkotaan Baru fokus pada (1) Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Untuk Kohesi Sosial, Inklusif, dan Mengakhiri Kemiskinan melalui penyediaan perumahan, air bersih dan pengolahan limbah serta ruang-ruang publik; (2) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Peluang Peningkatan Kesejahteraan Secara Inklusif dan Berkelanjutan melalui transportasi terpadu dan terintegrasi, listrik dan teknologi telekomunikasi, energi terbarukan, serta (3) Pembangunan lingkungan berkelanjutan dan kota yang berketahanan melalui ruang terbuka hijau yang mempunyai ketahanan terhadap bencana, pengelolaan sumber daya air, limbah dan sampah yang ramah lingkungan dan berjangka panjang, pelayanan dan pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman, industri, dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk mendukung semuanya (Malisan et al., 2021; Adinugroho et al., 2022).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019, arahan kebijakan sangat jelas untuk membangun Kota Berkelanjutan dan berdaya saing, dengan lima kebijakan utamanya, yaitu: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN), dengan kawasan metropolitan baru di luar Jawa yang didorong sebagai pusat pertumbuhan melayani Kawasan Timur Indonesia, dan kawasan metropolitan yang sudah ada untuk menjadi pusat berskala global; (2) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk kota aman, nyaman, layak huni, dengan menyediakan sarana prasarana dasar, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, permukiman dan transportasi publik; (3) perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dengan penataan ruang, penyediaan sarana prasarana berkonsep hijau dan berketahanan; (4) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing, berbasis teknologi, dan budaya lokal; serta (5) peningkatan kapasitas tata kelola kota. Dengan misi pembangunan perlunya pengurangan kesenjangan dan upaya pemerataan keluar Jawa, maka Ibu Kota baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru diharapkan dapat membawa misi sebagai kota masa depan yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan paradigma kota modern dan berkelanjutan, globalisasi juga telah menunjukkan adanya paradigma kota-kota dunia untuk berkembang menjadi kota berkelas internasional. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki infrastruktur dengan standar global dan terkoneksi dengan kota-kota lain di dunia yang menjadi pusat bisnis, budaya, teknologi, maupun politik secara global. Kota berkelas internasional adalah kota yang memiliki peran yang berarti di dunia internasional, sehingga kota-kota di negara lain memiliki keinginan untuk terkoneksi dengannya. Sedangkan Ibu Kota berkelas internasional pada umumnya meliputi infrastruktur transportasi, taman dan ruang terbuka atau taman hutan kota, kegiatan-kegiatan kebudayaan, obyek wisata, monumen-monumen bersejarah dan museum, hotel dan akomodasi berkelas internasional, kenyamanan sebuah kota yang berkelanjutan, keterjangkauan '*cost of living*', infrastruktur dan kegiatan olahraga internasional, pusat-pusat konvensi dan pameran berkelas internasional, dan lainnya. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional dan regional, seperti anggota berbagai organisasi PBB, anggota G-20, anggota Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (APEC), anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan ASEAN; serta keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam berbagai perjanjian dan konferensi internasional dan regional, menuntut Indonesia untuk memiliki Ibu Kota yang selalu siap dalam penyelenggaraan berbagai even internasional. Percepatan Pembangunan IKN ini diharapkan menunjang untuk menjawab mengenai kegiatan yang aktif dilakukan negara Indonesia dalam event internasional tersebut.

Menurut Bappenas (2020) pembangunan IKN akan mengedepankan asas perencanaan kota yang berkonsep *Beautiful City, Radiant City, Garden City, Green City, eco-city, Smart city, Intelligent city*. Konsep ini akan terwujud apabila terjadi komunikasi politik yang mampu berjalan dengan baik melalui pendekatan model komunikasi politik. Secara konseptual, Cangara (2009) menjelaskan model komunikasi politik ini menjadi 3 (tiga) model, antara lain :

1. Model Sistemik. Model ini merupakan pola komunikasi politik yang utuh, satu-kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian di dalamnya dan saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Teori dalam model ini merujuk pada serangkaian pernyataan mengenai hubungan diantara variabel dependen dan independen yang diasumsikan berinteraksi satu sama lain. Artinya perubahan dalam satu atau lebih dari satu variabel bersamaan atau disusul dengan perubahan variabel lain atau kombinasi variabel.
2. Model Proses. Dinamika komunikasi politik sangat berkaitan dengan model komunikasi, yaitu model transaksi simultan dari Melvin L.DeFleur. Dengan karakteristiknya yg nonlinear, model ini menggambarkan tiga factor yang berpengaruh dalam proses komunikasi. Sistem komunikasi ini akhirnya akan membentuk model-model dari proses komunikasi politik. Pertama adalah faktor lingkungan fisik, yaitu tempat dimana komunikasi berlangsung dengan menekankan pada aspek what n how. Kedua, faktor situasi sosio-kultural, yaitu komunikasi merupakan bagian dari situasi social yang didalamnya terkandung makna cultural dan menciptakan identitas bagi para pelaku komunikasi. Ketiga, faktor hubungan sosial, yaitu status hubungan para pelaku komunikasi sangat berpengaruh baik terhadap isi pesan ataupun terhadap proses bagaimana pesan tersebut dikirim dan diterima. Selain itu proses komunikasi politik juga dapat melalui proses komunikasi persuasif dan kampanye media.
3. Model Efektifitas. Kemampuan seorang tokoh dalam mengirimkan pesan atau informasi yang baik, kemampuan menjadi pendengar yang baik, kemampuan atau ketrampilan menggunakan berbagai media atau alat audio visual merupakan bagian penting dalam melaksanakan komunikasi yang efektif. Komunikasi politik juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan pemasaran politik. Bagaimana sebuah komunikasi politik yang efektif dan tepat sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dari memenuhi kebutuhan – kebutuhan politik sebagai suatu strategi persaingan dalam dunia politik. Karena pada saat

ini semakin berkembangnya zaman, semakin maju pula persaingan politik, sehingga diperlukannya strategi pemasaran politik yang tepat pula. Dengan menggunakan teori-teori komunikasi maka dapat dipetakan strategi apa yang harus digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan politiknya kepada komunikan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan Hasil pembahasan dapat di kesimpulan bahwa komunikasi politik diperlukan dalam sebuah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa datang. Adanya sebuah tantangan mengenai pembangunan IKN dimasa datang maka dengan ini pemangku kepentingan harus paham dan terus melakukan evaluasi untuk pembangunan IKN yang terhindar dari konflik kepentingan. Komunikasi politik yang baik diseluruh aspek baik pemerintah, swasta dan masyarakat bakal calon IKN dibutuhkan dalam merespon pembangunan yang berkelanjutan terkhusus dalam memberikan aspek pemerataan dan kesejahteraan. Pembangunan IKN diperlukan strategi yaitu strategi komunikasi politik melalui representasi identitas budaya dalam pembangunan ikn, strategi komunikasi politik melalui pemahaman terhadap keberagaman budaya dan kondisi sosial ekonomi penduduk lokal perlu disiapkan, strategi komunikasi politik melalui keberlanjutan penghidupan penduduk lokal, diperlukan sinergi budaya dan kearifan lokal dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sehingga asas-asas dalam perencanaan ibu kota dapat terealisasi dengan optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugroho, W. C., Prasetyo, L. B., Kusmana, C., & Krisnawati, H. (2022). *Tracking Environmental Quality of Indonesia's New Capital City and its Surrounding Area*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 950, No. 1, p. 012077). IOP Publishing.
- Bappenas.(2020). Naskah Akademi Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.
- Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. *Jurnal Dekonstruksi*, 3(1), 1-12.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Hamdani, R. S. (2020). *Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia*. *Journal of Regional and*



*Rural Development Planning* (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan), 4(1), 43-62.

Humas LIPI. (2020a). Mengurangi Risiko Sosial dalam Pemindahan Ibu Kota. Retrieved from [http:// lipi.go.id/berita/single/Mengurangi-Risiko-Sosialdalam-Pemindahan-Ibu-Kota/21644](http://lipi.go.id/berita/single/Mengurangi-Risiko-Sosialdalam-Pemindahan-Ibu-Kota/21644).

Kementerian PPN/Bappenas.(2020). Lampiran Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Proyek Prioritas Strategi.

Kodir, A., Hadi, N., Astina, I. K., Taryana, D., & Ratnawati, N. (2021). *The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia. In Development, Social Change and Environmental Sustainability* (pp. 57-61). Routledge.

Malisan, J., Sujarwanto, S., Arief, B., Fadhil, D. N. M., & Rahardjo, S. (2021). Kajian Pengembangan Pelabuhan Dalam Mendukung Ibu Kota Baru Berdasarkan Konsep *Smart City, Smart Mobility*. *Jurnal Sistem Transportasi & Logistik*, 1(1).

Menteri PPN/Kepala Bappenas. (2019). Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara. Report.

Nasional, M. P. P., & Bappenas, K. (2019). Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara. Disampaikan dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara, Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green and Beautiful, Jakarta, 26.

Pratama, P. Y., Budiman, B., & Sarmiasih, M. (2019). *A Comparative Political Analysis Between The New Order Regime And The Reformed Era In Indonesia: A Case Study Of Oligarchy Politics In The Mining Industry Of East Kalimantan. Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(3), 194-207.

Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Republika.co.id. (2022). Cara bijak mengomunikasikan ibu kota negara baru-ke publik.

Salsabila, A. H., & Nurwati, N. (2020). Deforestasi Dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 27-39.

Sarmita, I. M., & Simamora, A. H. (2018). Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Tipologi Migrasi Migran Asal Jawa Di Kuta Selatan-Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 135–143. <http://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16528>

Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*, 28, 1-12.

- Sujana, I. N. (2019). Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2-2), 49-578.
- Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379-39
- Tempo. (2019). Riset Indef: Ada Dampak Negatif Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. *Tempo. Co*, pp. 1–2. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1239682/riset-indef-ada-dampak-negatifpemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan/full&view=ok>.